

TINGKAT PENDAPATAN DAN KETAHANAN PETANI PLASMA PIR KELAPA SAWIT

Ferry Salman dan Teguh Wahyono

ABSTRAK

*Agar kontinuitas kehidupan ekonomi petani plasma melalui pola PIR dapat terjamin, maka usahatani tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) harus dijaga kelestariannya, serta dapat meningkatkan pendapatan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pendapatan petani dalam memenuhi kehidupan ekonominya melalui pola PIR dan tingkat ketahanan petani untuk terus menjadi peserta PIR. Studi ini merupakan kasus yang terjadi di proyek PIR-BUN kelapa sawit yang terletak di propinsi Sumatera Selatan. Untuk menganalisisnya digunakan metode kuantitatif sederhana, serta metode kualitatif yang bersifat antropologis melalui pembahasan kondisi kehidupan ekonomi masa lalu dan prospek kondisi kehidupannya mendatang. Berdasarkan hasil analisis data dapat dikemukakan bahwa, perkembangan kehidupan ekonomi petani plasma sampai dengan Maret 1998, kondisinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga harus mencari tambahan di luar usahatani. Sedangkan tingkat ketahanan petani peserta PIR perkebunan kelapa sawit masih tergolong rendah, karena persentase petani yang meninggalkan kavlingnya masih relatif tinggi (18%).*

Kata kunci : *Elaeis guineensis*, tingkat pendapatan, ketahanan petani plasma

PENDAHULUAN

Sasaran utama pembangunan perkebunan dengan pola PIR adalah petani kecil perkebunan rakyat. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan perkebunan pola PIR tersebut, yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peserta (1). Khusus untuk komoditas kelapa sawit (*Elaeis guineensis*), pengelolaan perkebunan yang pertama kali melibatkan petani kecil adalah melalui pola PIR. Selanjutnya perkembangan usahatani kelapa sawit ini diikuti oleh petani-petani perorangan yang mengelola usahatannya dengan pola swadaya murni terutama di propinsi Sumatera Utara dan Riau.

Agar pengelolaan usahatani tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu

upaya peningkatan ekonomi petani plasma melalui berbagai kegiatan berupa pembinaan, bimbingan dan penyuluhan serta bantuan kemudahan untuk memperoleh kredit dan fasilitas-fasilitas lain sehingga pendapatan petani plasma meningkat. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam pola PIR, perusahaan perkebunan besar ditugaskan untuk membina petani pekebun dalam usahatani kebunnya. Perkebunan besar ditugaskan sebagai pembina, salah satu alasannya adalah bahwa produktivitas perkebunan besar jauh di atas perkebunan rakyat. Oleh karena itu pemindahan teknologi dari perkebunan besar ke perkebunan rakyat diasumsikan akan dapat lebih meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat (3). Dengan kata lain, diadopsinya teknologi modern perkebunan besar oleh perkebunan rakyat

diharapkan efisiensi perkebunan rakyat dapat ditingkatkan. Apabila dengan bimbingan yang baik dari perkebunan besar, produktivitas kebun plasma diharapkan sama atau hampir sama dengan perkebunan besar, maka jelaslah bahwa sistem perkebunan pola PIR ini akan sama efisiennya, bahkan lebih, daripada sistem perkebunan besar gaya lama (4).

Studi ini bertujuan untuk mengkaji tingkat pendapatan petani dalam memenuhi kehidupan ekonomi melalui pola PIR, dan tingkat ketahanan petani untuk terus menjadi peserta PIR.

BAHAN DAN METODE

Unit analisis dalam studi ini adalah usahatani kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh plasma. Penentuan sampel lokasi areal kebun dilakukan secara purposif (*purposive sampling*), dengan kriteria (6): 1) merupakan areal atau bagian proyek PIR kelapa sawit yang telah menghasilkan, 2) kondisi sosial ekonomi petani plasmanya beragam. Unit areal usahatani kebun kelapa sawit yang terpilih sebagai sampel meliputi 3 lokasi daerah. Sementara itu pengambilan sampel usahatani kebun plasma dilakukan melalui pendekatan acak sederhana (*simple random approach*), mengingat kondisi petani plasma relatif homogen dipandang dari segi (5, 9): 1) jenis tanaman yang diusahakan, 2) tujuan pasar produk, 3) cara memperoleh saprodinya, dan 4) statusnya sebagai peserta PIR.

Beberapa peubah sosioekonomis yang terkait dengan pengembangan plasma, meliputi peubah bebas seperti: jenis pekerjaan sebelum ikut PIR, pendapatan total sebelum ikut PIR, pendapatan total setelah ikut PIR, peluang kerja di

sektor lain, tekanan kehidupan ekonomi. Sedangkan peubah tak bebas meliputi: tingkat pendapatan dan tingkat ketahanan.

Studi ini dilakukan pada April 1998, merupakan kasus yang terjadi di proyek PIR-BUN kelapa sawit yang terletak di propinsi Sumatera Selatan. Unit areal usahatani kebun kelapa sawit yang dipilih sebagai sampel meliputi 3 lokasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petani, sedangkan data sekunder meliputi jumlah tegakan pohon, sisipan tanaman, produksi TBS, pemupukan, dan curah hujan diperoleh dari kantor kebun maupun bagian tanaman di kantor direksi.

Untuk menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi petani plasma, digunakan metode kuantitatif sederhana melalui perbandingan tingkat pendapatan antara sebelum dan sesudah menjadi peserta PIR, serta metode kualitatif yang bersifat antropologis melalui pembahasan kondisi kehidupan ekonomi masa lalu dan prospek kondisi kehidupan mendatang. Selanjutnya untuk menganalisis tingkat ketahanan petani agar terus menjadi peserta PIR, digunakan metode kuantitatif dengan menghitung persentase petani yang meninggalkan kavlingnya, serta metode kualitatif bersifat antropologis melalui pembahasan mengenai faktor penyebab sehingga mereka meninggalkan kavlingnya (2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu sasaran dilaksanakannya pola PIR adalah sebagai sarana pemerataan pembangunan, yang sampai dengan sekarang sebagian sasaran tersebut telah tercapai, antara lain adalah (7):

1. Terlaksananya reforma agraria karena peserta PIR yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, adalah petani tak bertanah. Sementara itu tanah-tanah yang digunakan oleh pemerintah untuk membangun PIR merupakan tanah milik negara yang tidak produktif dan tanah telantar yang pemilikannya tak jelas. Melalui PIR ini tanah-tanah yang semula tidak produktif dan status pemilikannya tidak jelas dapat diusahakan menjadi lebih produktif dan lebih jelas statusnya.
2. Terjangkaunya rakyat kecil, sehingga rakyat tersebut memperoleh kesempatan untuk membangun masa depannya menjadi lebih baik.
3. Terjangkaunya wilayah yang luas, mengingat proyek PIR dibangun tersebut di beberapa propinsi di Indonesia.

Meskipun demikian masih perlu dikaji apakah sasaran tersebut telah berhasil mencapai pada upaya perbaikan kehidupan ekonomi petani secara lestari. Kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini pendapatan petani peserta PIR dari usahatani kebun plasma masih belum stabil, sangat tergantung pada produktivitas tanaman. Oleh karena itu penggalan sumber pendapatan selain yang berasal dari kebun plasma perlu diupayakan agar pemenuhan kebutuhan hidup berkesinambungan. Salah satu upaya adalah menggali potensi lahan pekarangan melalui usahatani tanaman pangan dan tanaman keras lainnya. Subsektor peternakan juga berpotensi untuk dikembangkan, misalnya ternak kambing, sapi, ayam, itik dan sebagainya, demikian juga subsektor perdagangan dan industri rumah tangga.

Ketahanan petani dapat dipandang dari segi keuletan petani dalam melaksana-

kan usahatani kebun utama yang disediakan dalam pola PIR, dalam rangka memperoleh sumber pendapatan utama sebagai sarana untuk menggantungkan kehidupannya dalam jangka panjang bahkan untuk selamanya. Pada beberapa kasus terjadi bahwa petani tidak tahan tinggal di kawasan PIR dengan profesi sebagai peserta PIR.

Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa petani peserta masih banyak yang tidak mampu mengadopsi teknologi serta tidak disiplin, misalnya: 1) mengusahakan kebun sesuai dengan sistem pertanian mereka dulu tanpa mengindahkan syarat kultur teknis, 2) menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebun sementara mereka hanya menganggur, 3) menjual lahan kebun di bawah tangan secara diam-diam, 4) menggadaikan atau menjual kavling kebun secara terang-terangan dan sebagainya (7).

Tidak adanya alternatif lain dalam memperoleh hasil panen yang bisa segera dijual juga merupakan pelanggaran disiplin para petani pada saat memanen. Permasalahan ini timbul pada diri petani karena adanya kebutuhan uang tunai yang mendesak untuk memenuhi keperluan hidup keluarga mereka. Dengan demikian akan berpengaruh pada pola panen mereka, yaitu cenderung menginginkan produksi tinggi dalam waktu singkat dengan tidak mengindahkan aturan teknis yang ditetapkan. Akibatnya tanaman tidak akan dapat berproduksi secara optimal dalam jangka panjang, sehingga kredit tidak dapat dibayar lunas tepat pada waktunya. Faktor penyebabnya, dalam pola PIR para petani dituntut untuk mampu menyerap dengan cepat paket teknologi, manajemen yang cukup rumit, dan disiplin tinggi. Keikutsertaan mereka dalam pola PIR merupakan loncatan budaya yang cukup jauh.

1. Tingkat pendapatan petani plasma

Petani peserta PIR perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan, antara lain: petani, buruh tani, buruh bangunan, sopir, pedagang kecil-kecilan, serabutan dan lain-lain, dengan penghasilan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup. Secara nominal rata-rata pendapatan mereka sekitar Rp. 90.000,- per bulan. Daerah asal mereka juga meliputi berbagai wilayah, misalnya Jawa, Bali, Lampung, dan lokal.

Dalam pola PIR setiap peserta PIR berlaku sebagai debitur, demikian pula untuk peserta PIR di ketiga lokasi. Besarnya plafon kredit adalah antara Rp 5.000.000,- sampai dengan Rp 8.000.000,- untuk 2 ha kelapa sawit (tergantung waktu tanamnya) yang telah mulai diangsur pada saat tanaman kelapa sawit mulai menghasilkan. Jadwal waktu pelunasannya antara tahun 1999 sampai dengan 2003.

Perkembangan terakhir pendapatan bulanan setiap keluarga petani plasma dari usahatani kelapa sawit, dapat diamati pada data bulan Februari 1998, yaitu rata-rata Rp 235.000,- selama setahun terakhir. Pendapatan ini diperoleh dari hasil penjualan TBS kepada perusahaan inti setelah dikurangi biaya produksi yang meliputi: 1) premi pengurus organisasi petani Rp 6/kg TBS, 2) pengangkutan TBS Rp 11/kg TBS, 3) pembelian pupuk Rp 35/kg TBS, 4) perbaikan jalan Rp 2,50/kg TBS, 5) *wiping* lalang Rp 0,50/kg TBS, dan 6) angsuran kredit 30 % dari nilai jual TBS per bulan.

Pendapatan yang relatif rendah ini bagi petani beserta keluarganya, memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Rendahnya produktivitas tanaman, merupakan faktor penyebab ren-

dahnya pendapatan petani, meskipun pada awal bulan Maret 1998 tersebut harga tandan buah segar (TBS) mencapai Rp 371/kg. Produktivitas TBS yang dicapai petani rata-rata kurang dari 1 ton/bulan/2ha. Sementara itu rendahnya produktivitas TBS disebabkan oleh pemeliharaan yang belum menurut standar, serta panjangnya musim kemarau. Mereka terpaksa mengalokasikan tenaga untuk mencari kegiatan kerja lain yang dapat menjadi sumber pendapatan secara cepat, misalnya menjadi buruh perusahaan HPH, buruh perusahaan perkebunan besar, buruh sadap karet dan lain-lain. Sebagian petani juga lebih memperhatikan lahan pekarangan untuk usahatani tanaman buah-buahan, sayuran dan sebagian lainnya berusaha ternak. Tambahan penghasilan dari luar usahatani kebun sawit, rata-rata berkisar antara Rp 50.000,- sampai dengan Rp 100.000,-/bulan.

2. Tingkat ketahanan petani

Keikutsertaan seseorang ke dalam pola PIR perkebunan diharapkan dapat mendorong orang tersebut, sehingga menjadi petani pekebun profesional dengan kata lain menjadi tuan di tanahnya sendiri. Dengan demikian usahatani kebun haruslah merupakan sarana untuk memperoleh sumber utama pendapatan rumah tangga. Namun demikian, upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sehingga peserta PIR tersebut menjadi tuan di tanahnya sendiri belum sepenuhnya berhasil.

Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa indikator petani antara lain: 1) tidak mau bekerja langsung dalam kegiatan usahatani, namun mengupah orang lain, 2) tidak bersedia bertempat tinggal di permukiman yang disediakan, 3) menyewakan dan atau menggadaikan kavlingnya, 4) meninggalkan atau menjual kavlingnya.

Kondisi tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tertulis yang telah disepakati (antara Petani, Perusahaan Inti, Bank, dan Ditjenbun) sewaktu akad kredit, dimana petani berperan sebagai penerima kredit. Para petani yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat ketahanannya rendah. Tidak dilaksanakannya sanksi terhadap para pelanggar oleh pihak yang berwenang (pemerintah), maka terbuka peluang oleh para petani dan pemilik modal (yang membeli kavling petani secara di bawah tangan) untuk melakukan pelanggaran.

Petani plasma melakukan pelanggaran tersebut karena terdorong untuk memperoleh peluang kerja di sektor atau tempat lain yang lebih memberikan kesejahteraan baginya, baik berupa pendapatan atau kenikmatan yang bersifat non materil misalnya bisa lebih banyak santai.

Hasil pengamatan pada salah satu lokasi proyek PIR perkebunan kelapa sawit, yang terdiri dari 1.945 KK petani, terdapat 353 petani (18%) yang melakukan pengalihan hak atas kavling atau rinciannya secara lengkap tertera pada Tabel 1. Jika pelanggaran semacam ini tidak segera ditanggulangi dengan memberlakukan aturan yang tegas dan lugas, maka upaya pemerintah untuk menjadikan tuan di tanahnya sendiri bagi peserta PIR akan sia-sia. Peraturan tersebut yang paling penting adalah memuat ketentuan sanksi yang tegas pada para pelanggar.

Meskipun banyak alasan yang dikemukakan oleh para petani yang mengalihkan kavling, namun dengan persentase pengalihan yang sangat tinggi tersebut dianggap alasan tersebut tidak tepat.

Tabel 1. Daftar petani yang mengalihkan hak atas kavlingnya

No	Unit	Jumlah KK (orang)	Alih kavling (orang)	Persentase (%)
1.	III	250	22	8,80
2.	V	401	112	27,93
3.	VI	250	68	27,20
4.	VII	310	9	2,90
5.	IX	150	25	16,66
6.	X	259	84	32,43
7.	XI	325	33	10,15
Rata-rata		278	50	18,01

Sumber: Kantor Administratur Perkebunan

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan kehidupan ekonomi petani plasma sampai dengan Maret 1998, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga harus mencari tambahan di luar usahatani. Tingkat ketahanan petani peserta PIR perkebunan kelapa sawit masih tergolong rendah, karena persentase petani yang meninggalkan kavlingnya masih relatif tinggi (18%).

Penyediaan peluang kerja bagi petani peserta oleh pemerintah maupun pihak yang terkait di saat paceklik sangat mutlak diperlukan, karena menyangkut masalah kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditunda, khususnya pangan. Perlu diberlakukan peraturan yang mengikat, tegas, dan lugas bagi para pelanggar ketentuan yang tertulis sebagai persyaratan keikutsertaan seseorang dalam program PIR perkebunan.

DAFTAR PUSTAKA

1. DITJENBUN. 1992. Perusahaan inti rakyat perkebunan : pelaksanaan dan penilaian. Direktorat Jenderal Perkebunan. Tim Khusus Proyek Perkebunan Inti Rakyat. Jakarta.

2. KOENTJARANINGRAT. 1974. Pengantar antropologi. Aksara Baru. Jakarta. 223 p.
3. MUBYARTO. 1985. Peranan PIR dalam pengembangan petani pekebun. Perkebunan Indonesia. II(1/2): 71-77.
4. MUBYARTO. 1986. PIRBUN dan Peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Kumpulan makalah pertemuan ilmiah PIR-BUN. LPP. Yogyakarta. 21 p.
5. NAZIR, M. 1988. Metode penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. 621 p.
6. SINGARIMBUN, M dan SOFIAN EFFENDI. 1989. Metode penelitian survai. LP3ES. Jakarta. 336p.
7. SOETRISNO, L. 1989. Masalah dan prospek PIR-BUN. PRISMA. XVIII(4): 65-72.
8. SUPARMOKO, M. 1987. Metode penelitian praktis (untuk ilmu-ilmu soial dan ekonomi). BPFE. Yogyakarta. 169 p.